Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 25526-25530

Pengaruh Gaya Kepemimpin Tertinggi Iran Terhadap Pembentukan Sikap Sosial, Politik, Dan Ketahanan Ekonomi

Siti Nur Juliansyah[1], Rifky Maolana[2], Chantika Trie Andini[3], Mukaromah[4]
Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Siti Nur Juliansyah e-mail: jullliaapst@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of supreme leadership styles in Iran on the formation of social, political, and economic resilience in the post-1979 Iranian Revolution. Iran's theocratic leadership system, based on the doctrine of Wilayat al-Faqih, positions supreme leaders, such as Ali Khamenei, as both political and spiritual authorities. This study uses qualitative methods with an interpretive-historical and sociological approach through a literature review of primary and secondary sources. The results show that an ideological-religious leadership style can foster strong social solidarity through the internalization of religious values, while simultaneously creating polarization between conservative groups and modern urban society. Politically, centralistic leadership strengthens ideological legitimacy but has the potential to undermine trust in formal democratic institutions. Meanwhile, in the economic sphere, the application of the concept of resistance economy has been shown to increase national independence and resilience to international sanctions, although it also poses challenges in the form of economic inefficiency and limited transparency. Thus, this study confirms that the integration of religious ideology and state policy plays a crucial role in shaping Iran's national resilience amidst global pressures.

Keywords: Leadership Style, Ideological Resilience, Islamic Revolution of Iran, Khamenei, Resistance Economy.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam dinamika politik global, kepemimpinan suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan serta membentuk karakter sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Hal ini semakin relevan ketika kepemimpinan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan religius, seperti yang terjadi di Republik Islam Iran pasca Revolusi Iran 1979. Sistem kepemimpinan Iran yang berlandaskan pada prinsip keagamaan menjadikan pemimpin tertinggi tidak hanya sebagai kepala negara secara politik, tetapi juga sebagai otoritas moral dan spiritual.

Gaya kepemimpinan di Iran, khususnya di bawah Ali Khamenei, menunjukkan bagaimana integrasi antara ideologi agama dan kebijakan negara dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kepemimpinan ini berperan dalam membentuk sikap sosial yang kolektif, sikap politik yang resistif terhadap pengaruh asing, serta ketahanan ekonomi yang berbasis pada kemandirian nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan tertinggi Iran terhadap pembentukan sikap sosial, politik, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara ideologi kepemimpinan dengan implementasi kebijakan negara serta dampaknya terhadap daya tahan nasional Iran dalam menghadapi tantangan global.

Republik Islam Iran merupakan salah satu negara yang memiliki sistem politik unik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin religius yang memiliki legitimasi ideologis dan spiritual. Sejak terjadinya Revolusi Iran 1979, Iran mengalami transformasi besar dari sistem monarki menjadi negara berbasis teokrasi dengan doktrin Wilayat al-Faqih. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik.

Gaya kepemimpinan pemimpin tertinggi Iran, terutama Ali Khamenei, memainkan peran sentral dalam membangun narasi ideologis yang menekankan nilai-nilai religius, perlawanan terhadap dominasi asing, serta pentingnya kemandirian nasional. Narasi ini kemudian memengaruhi sikap masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik internasional dan sanksi ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, Iran mengembangkan konsep ekonomi resistensi sebagai strategi untuk menghadapi sanksi internasional. Pendekatan ini menekankan pada penguatan produksi domestik, pengurangan ketergantungan terhadap impor, serta pengembangan teknologi lokal. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak hanya berpengaruh pada aspek ideologis, tetapi juga pada ketahanan ekonomi negara.

Selain itu, peran ulama Syiah sebagai aktor politik utama turut memperkuat legitimasi kepemimpinan dan membentuk solidaritas sosial yang tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat Iran memiliki tingkat ketahanan sosial dan politik yang relatif kuat dalam menghadapi tekanan eksternal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana gaya kepemimpinan tertinggi Iran mampu memengaruhi pembentukan sikap sosial, politik, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepemimpinan ideologis dan daya tahan nasional suatu negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif-historis dan sosiologis. Untuk memahami dinamika kepemimpinan tertinggi Iran dalam konteks sejarah, khususnya sejak Revolusi Iran 1979 hingga perkembangan kebijakan kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan tersebut memengaruhi pembentukan sikap sosial dan politik masyarakat, termasuk peran ulama Syiah sebagai aktor utama yang memiliki legitimasi religius dan pengaruh struktural dalam kehidupan bernegara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi pidato-pidato pemimpin tertinggi Iran, khususnya Ayatollah Ali Khamenei, yang diperoleh dari situs resmi dan publikasi media Iran, serta dokumen kebijakan seperti General Policies of the Resistance Economy (2014). Adapun sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, laporan lembaga think-tank internasional seperti Council on Foreign Relations dan Rawabet Center, serta kajian akademik terkait peran IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) dalam bidang politik dan ekonomi. Analisis data dilakukan dengan teknik comparative ideology analysis, yaitu membandingkan konsep ideologi kepemimpinan Iran dengan implementasinya dalam kebijakan nyata, terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka filsafat pertahanan, di mana sistem pertahanan Iran dianalisis berdasarkan doktrin ideologis seperti jihad dan martyrdom yang menjadi dasar mobilisasi sosial dan legitimasi politik.

Langkah-langkah analisis meliputi: (1) menganalisis Revolusi Iran 1979 sebagai gerakan politik berbasis agama yang menjadi dasar ideologi dan legitimasi kepemimpinan; (2) mengkaji transformasi peran politik ulama Syiah dalam dialektika doktrin dan konteks sebagai aktor utama dalam kekuasaan; (3) menganalisis peran ulama Syiah dalam transformasi sosial dalam membentuk solidaritas dan nasionalisme religius; (4) mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk budaya strategis Republik Islam Iran seperti sejarah, ideologi, dan geopolitik; (5) mengkaji pengaruh budaya strategis dalam isu program nuklir Iran sebagai bentuk pertahanan kedaulatan; serta (6) mengevaluasi transformasi

ekonomi dalam Revolusi Iran melalui konsep ekonomi resistensi dalam menghadapi sanksi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

REVOLUSI IRAN 1979 SEBAGAI GERAKAN POLITIK BERBASIS AGAMA

Gaya kepemimpinan tertinggi Iran pascarevolusi 1979 berperan besar dalam membentuk sikap sosial masyarakat yang religius dan kolektif. Dengan menjadikan Islam Syiah sebagai dasar legitimasi, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai figur moral yang mengarahkan perilaku sosial. Nilai-nilai seperti pengorbanan, keadilan, dan perlawanan terhadap kezaliman yang berakar dari narasi Karbala ditanamkan secara konsisten melalui ceramah, media, dan institusi keagamaan. Akibatnya, masyarakat memandang partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sebagai kewajiban religius, bukan sekadar pilihan rasional. Hal ini menciptakan solidaritas yang kuat di antara rakyat serta memperkuat kohesi sosial dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal.

Dalam bidang politik dan ekonomi, kepemimpinan Iran menanamkan ideologi anti-imperialisme yang membentuk sikap resistensi terhadap kekuatan asing. Narasi bahwa Iran "dikepung" oleh musuh eksternal digunakan untuk membangun rasa nasionalisme yang tinggi sekaligus membenarkan kebijakan negara, termasuk dalam menghadapi sanksi ekonomi. Dampaknya, masyarakat cenderung menerima kesulitan ekonomi sebagai bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan negara. Dukungan terhadap program strategis seperti pengembangan nuklir tetap tinggi meskipun berdampak pada kesejahteraan, karena dipandang sebagai simbol kemajuan dan martabat bangsa. Dengan demikian, gaya kepemimpinan ini berhasil membentuk ketahanan ekonomi berbasis ideologi, di mana daya tahan masyarakat tidak hanya bergantung pada kondisi material, tetapi juga pada keyakinan politik dan religius yang kuat.

TRANSFORMASI PERAN POLITIK ULAMA SYIAH: DIALEKTIKA DOKTRIN DAN KONTEK

Gaya kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran berakar pada transformasi historis peran politik ulama Syiah yang bergerak dari quietisme menuju aktivisme teokratis. Perubahan ini mencapai puncaknya pasca-Revolusi 1979 melalui doktrin Wilayat al-Faqih, yang memberikan legitimasi bagi ulama untuk memegang otoritas politik penuh di masa kegaiban Imam. Dalam konteks ini, kepemimpinan Ayatollah Khamenei tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan simbolik, memadukan otoritas spiritual dengan kendali politik-militer. Melalui narasi keagamaan seperti jihad defensif dan simbolisme Karbala, kepemimpinan ini mampu membentuk sikap sosial masyarakat yang kolektif, resilien, dan berorientasi pada pengorbanan demi kepentingan bangsa dan agama. Hal ini memperkuat kohesi sosial sekaligus membangun legitimasi kekuasaan yang tidak semata bergantung pada mekanisme politik formal, melainkan juga pada internalisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan publik.

Gaya kepemimpinan tersebut juga berdampak signifikan terhadap sikap politik dan ketahanan ekonomi Iran, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti sanksi internasional. Alih-alih melemahkan, tekanan tersebut justru dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian nasional, sebagaimana tercermin dalam pengembangan industri domestik dan inovasi teknologi, termasuk produksi vaksin saat pandemi. Retorika kepemimpinan yang menekankan martabat, perlawanan, dan kemandirian seperti slogan hidup mulia atau mati syahid berhasil membentuk mentalitas kolektif yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing. Dengan demikian, kepemimpinan tertinggi Iran tidak hanya membentuk arah kebijakan negara, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membangun daya tahan sosial-politik dan ekonomi melalui integrasi antara ideologi, mobilisasi massa, dan strategi adaptif terhadap tantangan global.

TRANSFORMASI KETAHANAN EKONOMI DALAM REVOLUSI IRAN

Gaya kepemimpinan yang bersifat ideologis-religius, anti dependensi, dan berorientasi pada kemandirian telah melahirkan strategi ekonomi yang dikenal sebagai "ekonomi resistensi" (resistance economy/eqtesad-e moqavemati). Strategi ini menjadi kerangka utama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti sanksi ekonomi internasional. ebijakan ekonomi resistensi mendorong negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat kapasitas produksi domestik. Dalam sektor energi, Iran berhasil meningkatkan kemampuan pengolahan minyak dan gas secara mandiri. Kebijakan pembangunan kilang domestik menjadi respons terhadap krisis impor bahan bakar pada sekitar tahun 2010, yang pada akhirnya membawa Iran menuju swasembada bahan bakar dalam beberapa tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal justru berfungsi sebagai katalis bagi inovasi internal. Di sektor pangan, pemerintah Iran menerapkan kebijakan subsidi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, dan perlindungan terhadap petani lokal. Hasilnya, Iran sempat mencapai swasembada gandum pada awal dekade 2010-an. Meskipun capaian ini mengalami fluktuasi akibat faktor iklim dan ekonomi, kebijakan tersebut tetap mencerminkan orientasi kuat pada kemandirian pangan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Gaya kepemimpinan Ali Khamenei juga menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi domestik. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap teknologi asing akibat sanksi, Iran justru memperkuat investasi pada riset dan inovasi lokal. Hal ini terlihat dari perkembangan industri strategis seperti teknologi nuklir, farmasi, hingga industri pertahanan. Salah satu contoh konkret adalah produksi vaksin domestik COVID-19 (COVIran Barekat), yang menunjukkan kapasitas adaptif Iran dalam menghadapi krisis global di tengah keterbatasan akses internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan Iran pasca Revolusi Iran 1979 memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Melalui integrasi antara ideologi religius dan kekuasaan negara, kepemimpinan Ali Khamenei mampu membangun identitas nasional yang kuat, solidaritas sosial yang tinggi, serta sikap resistensi terhadap pengaruh eksternal. Dalam aspek sosial, nilai-nilai religius berhasil menciptakan kohesi masyarakat, meskipun di sisi lain memunculkan potensi polarisasi. Dalam aspek politik, sentralisasi kekuasaan memperkuat stabilitas ideologis, namun membatasi ruang demokrasi formal. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, penerapan konsep ekonomi resistensi terbukti mampu meningkatkan kemandirian nasional dan daya tahan terhadap sanksi internasional, meskipun masih menghadapi tantangan berupa inefisiensi dan keterbatasan transparansi. Secara keseluruhan, kepemimpinan ideologis di Iran terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun daya tahan nasional melalui sinergi antara nilai religius, strategi politik, dan kebijakan ekonomi.

REFERENSI

Al Jazeera Center for Studies. (2021). Iran's foreign policy and resistance strategy. Retrieved from https://studies.aljazeera.net

Ali Khamenei. (2014). General policies of the resistance economy. Tehran: Official Publications of the Islamic Republic of Iran. https://english.khamenei.ir/news/5396/Ayatollah-Khamenei-Announces-General-Policies-on-the-Economy

Bazoobandi, A. (2023). Populism, jihad and economic resistance. SSOAR. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/95025/ssoar-domes-2023-4-bazoobandi-Populism_jihad_and_economic_resistance.pdf

Brookings Institution. (2020). Iran's political structure and leadership dynamics. Retrieved from https://www.brookings.edu

Council on Foreign Relations. (2023). Iran's political system. Retrieved from https://www.cfr.org

Ervand Abrahamian. (2008). A history of modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press. https://share.google/Fv47owRruuoZ2mDw2

Hamid Dabashi. (2011). Iran, the green movement and the USA: The fox and the paradox. London: Zed Books. Iran, the Green Movement and the USA: The Fox and the Paradox: Dabashi, Hamid: 9781848138155: Amazon.com: Books. https://share.google/BEaQ4JgH39Db3DwPJ

Humanisa. (n.d.). Artikel tentang Khamenei dan "Resistance Economy". https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/538

International Journal (Moderndiplomacy). (2026, February 20). Iran's Supreme Leader Khamenei: How the 86-year-old confronts his greatest crisis yet. Modern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2026/02/20/irans-supreme-leader-khamenei-how-the-86-year-old-confronts-his-greatest-crisis-yet/

International Monetary Fund. (2022). Islamic Republic of Iran: Economic outlook. Retrieved from https://www.imf.org

Iranian Revolution 1979; Islamic Republic of Iran; Shi'a Clerics; Wilayat al-Faqih; Political, Social, and Cultural Transformation. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jtpm

Jerusalem Post. (2024). Opinion: Khamenei's reign and Iran's political decline. https://www.jpost.com/opinion/article-799801

Ketahanan ideologi; Ekonomi Resistensi; Wilayat al-Faqih; Revolusi Islam Iran; Pancasila; Pertahanan Nasional. Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, Vol. 3 No. 7, September 2025, hal. 96–11.

Khomeini, strategic culture, leadership, Iran's Islamic Revolution. 107-Article-Text-684-2-10-20211224.pdf

Rawabet Center for Research and Strategic Studies. (2022). Iran's resistance economy and strategic policy. Retrieved from https://rawabetcenter.com

Saeid Golkar. (2016). Captive society: The Basij militia and social control in Iran. New York: Columbia University Press. Amazon.com. https://share.google/1pp1c6FFd651lT7xT

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). Bab I (skripsi/tesis tentang Iran). https://etd.umy.ac.id/id/eprint/24430/3/Bab%20I.pdf

Vali Nasr. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. New York: W. W. Norton & Company. https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1389821623d12Hesova.pdf

World Bank. (2023). Iran economic monitor. Retrieved from https://www.worldbank.org